

Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Terbitan : Vol. 02, No. 02 (Mei-Agustus 2025)
Online at : https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/alamiyah
Email : jurnalamiyahmultidisiplin@gmail.com
E-ISSN : 3048-2038

Sejarah Multikulturalisme dan Moderasi Beragama

Helda Agustina[1], Imelda Anggi Purnamasari[2], Muhammad Yasin[3]
[1,2,3]Prodi Ekonomi Syariah, STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia
e-mail: helda2875@gmail.com[1], imeldaanggi1505@gmail.com[2], mysgt1978@gmail.com[3]

Abstrak

Multikulturalisme merupakan pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat. Di Indonesia, multikulturalisme berkembang seiring dinamika sosial, kolonialisme, migrasi, dan globalisasi. Moderasi beragama menjadi pendekatan strategis dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ajaran agama dan prinsip toleransi serta harmoni sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan sejarah multikulturalisme dan peran moderasi beragama dalam membentuk karakter sosial-budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Rumusan masalah meliputi bagaimana multikulturalisme terbentuk sejak masa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit serta bagaimana nilai moderasi beragama terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis sumber-sumber ilmiah termasuk buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen sejarah. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut telah melekat sejak masa awal peradaban, melalui praktik keagamaan yang inklusif, peran tokoh agama, dan lembaga pendidikan tradisional, yang secara kolektif membentuk masyarakat yang toleran dan harmonis.

Kata kunci: Multikulturalisme, Moderasi Beragama, Sejarah, Toleransi, Indonesia.

Abstract

Multiculturalism is a view that recognizes and appreciates cultural, ethnic and religious diversity in society. In Indonesia, multiculturalism develops along with social dynamics, colonialism, migration, and globalization. Religious moderation is a strategic approach in maintaining a balance between the implementation of religious teachings and the principles of tolerance and social harmony. This research aims to examine the historical development of multiculturalism and the role of religious moderation in shaping the socio-cultural character of Indonesia's pluralistic society. The formulation of the problem includes how multiculturalism was formed since the time of kingdoms such as Sriwijaya and Majapahit and how the value of religious moderation is internalized in people's lives. The method used is a literature study with analysis of scientific sources including academic books, scientific journal articles, and historical documents. This study shows that these values have been inherent since the early days of civilization, through inclusive religious practices, the role of religious leaders, and traditional educational institutions, which collectively form a tolerant and harmonious society.

***Keywords**: Multiculturalism, Religious Moderation, History, Tolerance, Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan warisan sejarah panjang yang mencerminkan realitas multikulturalisme yang telah tumbuh sejak masa kerajaan-kerajaan nusantara, era kolonialisme, hingga kemerdekaan. Dalam konteks ini,

Copyright © 2025 Helda Agustina, et al.
(cc) BY

multikulturalisme bukan hanya kondisi sosial, tetapi juga nilai yang harus dijaga dan dirawat demi terciptanya harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rozi, 2017)

Meski demikian, keberagaman juga sering kali menjadi sumber potensi konflik, terutama ketika perbedaan tidak dikelola secara bijak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu merangkul keberagaman dengan sikap saling menghormati dan toleransi. Salah satu pendekatan tersebut adalah moderasi beragama sebuah cara pandang dan praktik keagamaan yang menekankan keseimbangan, menjauhi ekstremisme, serta mengedepankan dialog dan kerukunan antarumat beragama.

Studi mengenai sejarah multikulturalisme dan moderasi beragama penting dilakukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut terbentuk dan berkembang dalam masyarakat (Halimatus Sa'diyah, 2025). Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola perbedaan dengan cara yang inklusif dan adaptif. Pendekatan historis memungkinkan kita melihat peran kebijakan, tokoh, dan peristiwa penting dalam membentuk karakter bangsa yang moderat dan multikultural (Diwyarthi et al., 2025)

Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit merupakan contoh nyata awal dari praktik multikulturalisme di Nusantara. Di era Sriwijaya, misalnya, pelajar Buddhis dari mancanegara datang untuk belajar di pusat-pusat pendidikan agama yang terbuka dan toleran (Nur, 2025) Sementara di Majapahit, masyarakat hidup berdampingan dalam harmoni, meskipun menganut beragam kepercayaan seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Kondisi ini mencerminkan struktur sosial yang terbuka terhadap perbedaan keyakinan dan budaya (Hudin et al., 2025)

Penyebaran Islam di Indonesia juga menjadi bukti kuat adanya praktik moderasi beragama. Para penyebar Islam menggunakan pendekatan budaya yang lembut, menghormati tradisi lokal, dan menyampaikan ajaran Islam melalui seni seperti wayang, suluk, dan gamelan. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam diterima secara damai dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tanpa menggusur nilai-nilai lokal yang telah ada (Rohmah et al., 2025)

Berbagai kajian akademik menunjukkan pentingnya pendekatan nilai dalam pengelolaan keberagaman. Menurut Parekh (sebagaimana dikutip dalam Arief, 2024) multikulturalisme adalah pandangan normatif yang mengakui serta menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dikelola secara adil. Dalam perspektif antropologi Indonesia, Koentjaraningrat (sebagaimana dikutip dalam Wahyuni, 2018) menegaskan bahwa masyarakat Indonesia telah hidup dalam struktur sosial yang plural sejak masa lampau. Interaksi antarbudaya dan antaragama yang terjadi di kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit mencerminkan harmoni sosial yang dibangun melalui pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan.

Moderasi beragama menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk merawat keberagaman di Indonesia. Azyumardi Azra memaknai moderasi beragama sebagai cara pandang dan praktik keberagamaan yang menolak segala bentuk ekstremisme baik radikalisme maupun liberalisme serta menekankan keseimbangan dan penghormatan terhadap perbedaan (Madri et al., 2023). Senada dengan itu, Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa nilai-nilai moderasi telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, jauh sebelum istilah tersebut diperkenalkan secara akademik. Ia menekankan bahwa tradisi adat dan kearifan lokal telah mempraktikkan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik keagamaan (Zulfandika & Wulandari, 2024)

Dengan demikian, keterkaitan antara literatur dan fakta sejarah menunjukkan bahwa praktik multikulturalisme dan moderasi beragama di Indonesia bukanlah konsep baru, melainkan telah menjadi bagian dari identitas

kolektif bangsa. Sejarah Sriwijaya, Majapahit, serta penyebaran Islam yang damai menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi dan harmoni telah lama tertanam dalam budaya Indonesia.

Berangkat dari paparan di atas, tulisan ini difokuskan untuk mengkaji dua hal utama. Pertama, bagaimana proses sejarah membentuk realitas multikulturalisme di Indonesia sejak masa kerajaan. Kedua, bagaimana nilai-nilai moderasi beragama turut berperan dalam membentuk karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk dan toleran.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka (library research). Metode ini bertujuan menggali data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi lainnya. Pendekatan ini dipilih karena efektif untuk mengkaji fenomena sosial, historis, dan normatif yang tidak dapat diakses melalui observasi langsung (Ridley, 2012). Studi literatur memungkinkan ulasan mendalam terhadap teori dan dinamika sejarah multikulturalisme serta moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dengan menelaah sumber sekunder yang relevan, meliputi buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur yang membahas topik multikulturalisme dan moderasi beragama. Pemilihan sumber didasarkan pada kredibilitas, relevansi topik, serta kontribusinya dalam memperkaya pemahaman konseptual dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengakses informasi secara luas dan membandingkan berbagai pandangan teoritis dalam wacana ilmiah.

Analisis data menggunakan metode historis yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik meliputi pengumpulan sumber pustaka yang relevan. Proses verifikasi menilai keaslian dan kredibilitas sumber melalui kritik eksternal dan internal. Pada tahap interpretasi, data yang telah diverifikasi dianalisis dengan memperhatikan konteks sosial dan historis. Terakhir, historiografi menyusun hasil analisis menjadi narasi ilmiah yang runtut dan sistematis untuk merekonstruksi perkembangan multikulturalisme dan moderasi beragama di Indonesia secara komprehensif. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam dan objektif sekaligus kontribusi dalam memperkuat identitas nasional yang inklusif dan toleran.

Metode historis dipilih karena kemampuannya mengungkap proses dan dinamika sejarah secara mendalam dan objektif, serta menyajikan pemahaman komprehensif terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang lintas waktu. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menjelaskan evolusi multikulturalisme dan moderasi beragama dalam konteks historis Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Multikulturalisme di Indonesia Terbentuk Sejak Masa Kerajaan-Kerajaan Besar Seperti Sriwijaya dan Majapahit

Sejarah multikulturalisme di Indonesia memiliki akar yang kuat sejak masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, yang dikenal sebagai kerajaan maritim dan agraris dengan wilayah kekuasaan yang luas serta masyarakat yang heterogen. Keberagaman budaya, suku, dan agama dalam wilayah kekuasaan mereka mendorong lahirnya kehidupan sosial yang inklusif dan toleran (Cunino, 2018)

Pada masa Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13), kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadikan Sriwijaya tempat persinggahan pedagang dan pelajar dari Tiongkok, India, dan Arab (Aizid, 2016). Di

Copyright © 2025 Helda Agustina, et al.
(cc) BY

wilayah Palembang, ditemukan berbagai peninggalan arkeologis berupa prasasti berbahasa Melayu Kuno dan arca Buddha yang menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya tidak hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan agama yang bersifat terbuka terhadap berbagai pengaruh eksternal. Catatan perjalanan biksu Tiongkok, I-Tsing, memperkuat temuan ini dengan menyebut Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran utama bagi pelajar agama Buddha dari berbagai negara, yang mencerminkan masyarakat yang hidup dalam iklim keterbukaan dan toleransi antarbudaya (Suddin, 2024).

Temuan arkeologis lainnya, seperti Prasasti Kedukan Bukit yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, menegaskan bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan yang memiliki hubungan dagang dengan dunia luar. Fakta ini menunjukkan bahwa Sriwijaya menjadi ruang interaksi berbagai budaya dan agama secara dinamis (Ridwan, 2020). Selain itu, penemuan arca-arca Buddha di situs-situs keagamaan seperti Candi Muaro Jambi di Provinsi Jambi mencerminkan perkembangan ajaran Buddha yang diserap dan disesuaikan dengan tradisi lokal. Proses ini mengindikasikan terjadinya akulturasi antara ajaran asing dengan budaya masyarakat setempat. Catatan I-Tsing secara eksplisit menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat studi keagamaan yang terbuka bagi para pelajar dan biksu dari berbagai wilayah di Asia. Kondisi ini menguatkan pemahaman bahwa Sriwijaya merupakan entitas politik dan budaya yang inklusif serta mampu mengakomodasi keragaman agama dan etnis dalam tatanan sosialnya (Eni & Tsabit, 2017).

Kerajaan Sriwijaya menunjukkan karakter multikultural melalui keterbukaannya terhadap budaya dan agama luar, sebagaimana dibuktikan oleh temuan Prasasti Kedukan Bukit yang mengindikasikan adanya hubungan dagang internasional. Penemuan arca-arca Buddha di Candi Muaro Jambi memperlihatkan adanya proses akulturasi antara ajaran Buddha dengan tradisi lokal, yang menghasilkan budaya baru yang kaya dan beragam. Selain itu, catatan perjalanan I-Tsing menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha yang terbuka bagi pelajar dari berbagai negara, menegaskan sikap inklusif dan toleran yang dipegang kerajaan ini. Keseluruhan bukti ini memperkuat pemahaman bahwa Sriwijaya tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pendidikan, tetapi juga sebagai ruang interaksi budaya yang memungkinkan terbentuknya masyarakat multikultural yang plural dan harmonis (Mubarok & Bakri, 2021).

Adapun Kerajaan Majapahit yang berkembang pada abad ke-13 hingga ke-15, merupakan salah satu simbol kejayaan peradaban Nusantara yang berhasil menyatukan berbagai wilayah dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam. Dalam struktur masyarakat Majapahit, terdapat keragaman keyakinan seperti Hindu, Buddha, serta kepercayaan lokal yang berakar pada animisme dan dinamisme. Kerajaan ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, yang tercermin dalam tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam sistem pemerintahan. Selain itu, harmonisasi budaya dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, dan sistem hukum turut menunjukkan kemampuan Majapahit dalam mengelola keragaman secara inklusif dan berkeadaban (Arifin, 2024).

Kerajaan Majapahit merupakan representasi penting dari praktik multikulturalisme di Nusantara. Hal ini tercermin melalui peninggalan arkeologis seperti Candi Jawi yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Candi ini menunjukkan unsur sinkretisme keagamaan, yakni perpaduan antara ajaran Hindu dan Buddha, yang digunakan untuk menghormati raja penganut ajaran Siwa-Buddha. Keberadaan candi tersebut menjadi bukti bahwa Majapahit tidak menganut sistem keagamaan yang eksklusif, melainkan memberi ruang bagi keberagaman keyakinan dalam masyarakatnya. Selain itu, dokumen Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 menjadi sumber penting dalam

menggambarkan sistem sosial dan politik Kerajaan Majapahit. Naskah ini mencatat bahwa Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup berbagai daerah dengan latar belakang budaya dan etnis yang berbeda. Di dalamnya juga tercermin nilai-nilai toleransi keagamaan melalui penggabungan unsur-unsur ajaran Hindu dan Buddha, yang menunjukkan pengelolaan keragaman secara inklusif dan harmonis jauh sebelum istilah multikulturalisme dikenal secara konseptual dalam wacana modern (Eni & Tsabit, 2017).

Temuan-temuan sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit berhasil mengelola keragaman budaya dan agama secara inklusif dan harmonis jauh sebelum istilah multikulturalisme dikenal dalam wacana modern. Keberagaman yang tercermin dalam struktur candi-candi bercorak Hindu-Buddha serta naskah Negarakertagama mengindikasikan adanya sikap akomodatif terhadap berbagai keyakinan dan etnis di wilayah kekuasaannya. Analisis terhadap bukti sejarah tersebut mengungkapkan bahwa toleransi dan keterbukaan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial pada masa itu. Dengan demikian, pengalaman historis Kerajaan Majapahit memberikan dasar penting bagi pemahaman bahwa nilai-nilai multikulturalisme telah berakar kuat dalam sejarah Indonesia dan menjadi bagian integral dari identitas kebangsaan yang majemuk.

Berdasarkan hasil kajian historis dan analisis literatur, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan contoh awal praktik multikulturalisme di Nusantara, yang ditandai dengan penerimaan terhadap keragaman budaya, agama, dan etnis dalam wilayah kekuasaannya. Keduanya menjadikan toleransi dan keterbukaan sebagai fondasi kehidupan sosial yang inklusif. Meski serupa dalam nilai-nilai dasarnya, pendekatan mereka berbeda: Sriwijaya mengembangkan multikulturalisme bercorak kosmopolitan melalui aktivitas perdagangan dan pendidikan Buddha lintas negara, sementara Majapahit menonjolkan integrasi internal melalui sinkretisme Hindu-Buddha dan sistem politik yang merangkul keberagaman lokal. Untuk memperjelas perbandingan karakter multikultural antara Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, berikut ini disajikan ringkasan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Nilai-Nilai Multikultural dalam Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit

Aspek	Kerajaan Sriwijaya	Kerajaan Majapahit
Keberagaman Agama	Buddha, Hindu, kepercayaan lokal	Hindu, Buddha, Animisme, Dinamisme
Hubungan Antarbudaya	Perdagangan, pendidikan, dan diplomasi lintas negara	integrasi budaya, toleransi antaragama, serta penerapan hukum adat
Bukti Historis	Prasasti, arca Buddha, catatan I-Tsing	Candi Jawi, naskah *Negarakertagama*, dan situs arkeologis lainnya
Sikap Kerajaan	Terbuka dan akomodatif terhadap pendatang	Sinkretik dan inklusif terhadap perbedaan kepercayaan
Integrasi Budaya	Penyesuaian ajaran Buddha dengan budaya lokal	Perpaduan ajaran Siwa-Buddha (sinkretisme), serta ekspresi dalam seni dan sastra

Kedua model ini berhasil menciptakan masyarakat yang stabil dan plural, sekaligus menunjukkan bahwa penghormatan terhadap perbedaan telah menjadi bagian integral dari sejarah bangsa Indonesia. Dengan merujuk pada pengalaman historis tersebut, nilai-nilai multikultural yang telah terbukti menjaga stabilitas sosial dapat dijadikan pijakan dalam memperkuat integrasi nasional dan membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, adil, dan berkeadaban di era globalisasi.

Copyright © 2025 Helda Agustina, et al.
(cc) BY

Sejarah Moderasi Beragama Dalam Pembentukan Karakter Sosial dan Budaya Masyarakat Indonesia Yang Majemuk

Sejak masa lampau, sejarah Indonesia telah memperlihatkan akar kuat moderasi beragama dalam membentuk karakter sosial dan budaya masyarakat yang majemuk. Moderasi beragama merupakan isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman budaya dan agama. Dalam masyarakat yang terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya, moderasi beragama menjadi prinsip yang esensial untuk menciptakan keharmonisan sosial. Nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

Dengan demikian, moderasi beragama di Indonesia bukanlah sekadar konsep normatif, melainkan bagian penting dari proses sosial yang membentuk karakter masyarakat. Nilai-nilai tersebut tumbuh seiring waktu dan menjadi fondasi dalam menciptakan kehidupan yang damai dalam perbedaan serta memperkuat rasa kebersamaan dalam keberagaman. Dalam kerangka ini, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen harmoni, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi sosial terhadap pluralitas.

Dalam konteks masyarakat multikultural, moderasi beragama memiliki peran strategis dalam membangun toleransi, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mencegah potensi konflik sosial (Mubarok & Ghony, 2024). Sikap moderat dalam beragama juga mengajarkan masyarakat untuk tidak terjebak pada pemahaman keagamaan yang sempit atau fanatisme yang ekstrem. Sebaliknya, moderasi mendorong masyarakat untuk menerima keberagaman sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihormati dan dijaga (Rohman & Waskito, 2025).

Nilai-nilai toleransi dan kehidupan berdampingan telah tercermin dalam praktik sosial masyarakat Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Di Kerajaan Sriwijaya, misalnya, pusat pendidikan agama Buddha dikenal terbuka bagi pelajar dari berbagai wilayah Asia, sebagaimana dicatat oleh biksu Tiongkok, I-Tsing. Hal ini menunjukkan semangat keterbukaan dan inklusivitas dalam interaksi keagamaan pada masa tersebut. Sementara itu, pada masa Majapahit, masyarakat yang memeluk agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal hidup bersama dalam struktur sosial yang stabil serta saling menghargai (Rico Setyo Nugroho, 2025). Namun, praktik moderasi tersebut tidak lepas dari struktur kekuasaan kerajaan yang hierarkis, sehingga perlu dipahami bahwa toleransi saat itu berlangsung dalam konteks stabilitas politik, bukan kesetaraan hak seperti dalam demokrasi modern. Dengan demikian, praktik tersebut tetap relevan, namun membutuhkan reinterpretasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial kontemporer.

Kondisi ini mencerminkan praktik harmoni antarumat beragama yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Salah satu bukti konkret dari semangat moderasi tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Sutasoma* karya Mpu Tantular, yang memuat semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu." Semboyan ini tidak hanya mencerminkan pandangan inklusif terhadap perbedaan keyakinan, tetapi juga hingga kini menjadi simbol penting dalam menjaga persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia (Pramono et al., 2022). Jika dikaji dari perspektif teori moderasi beragama, semboyan ini sejatinya telah merepresentasikan semangat akomodatif dan pluralistik yang selaras dengan upaya kontemporer dalam membangun masyarakat majemuk yang harmonis.

Pendidikan agama dan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan memiliki peran signifikan dalam pembentukan karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang plural. Tradisi keilmuan yang berkembang di lingkungan lembaga-lembaga tersebut turut membentuk sikap keberagamaan yang inklusif, menjadikan

Indonesia sebagai negara dengan tradisi moderasi beragama yang kuat (Analisna et al., 2024). Temuan ini menguatkan argumen bahwa moderasi beragama bukan sekadar narasi modern, melainkan bagian dari kesinambungan sejarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Moderasi beragama di Indonesia bukanlah konsep baru. Ia merupakan warisan historis yang terus diperkuat dan menjadi bagian integral dari jati diri bangsa. Implementasi moderasi yang bersifat inklusif dan toleran memberikan kontribusi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman budaya dan agama (Astuti et al., 2025).

Temuan-temuan tersebut diperkuat oleh data empirik di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia, dalam berbagai konteks lokal, terbukti mampu membangun harmoni sosial di tengah perbedaan. Sebagai contoh, masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu tetap menjaga suasana kondusif bagi pemeluk agama lain, sementara masyarakat di Ambon dan Poso menunjukkan komitmen terhadap perdamaian melalui dialog lintas agama dan kerja sama antar komunitas pascakonflik. Fenomena ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai toleransi yang berakar pada sejarah dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (Mubarok, 2022);(Ramdhan & Arifin, 2025).

Selain fondasi historis yang kuat, literatur juga menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan keagamaan dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moderasi di tengah masyarakat. Menurut Komaruddin (dalam Usman, 2023) menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan bentuk keberagamaan yang menekankan nilai toleransi, keadilan, serta penolakan terhadap sikap ekstrem. Konsep ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Sejalan dengan itu, menurut Syamsuddin (dalam Alim & Munib, 2021) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya mengajarkan aspek ritual keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai hidup berdampingan, toleransi, kedamaian, dan keadilan sosial. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak sekadar institusi formal, tetapi juga agen perubahan sosial yang mewarisi sekaligus meneruskan nilai-nilai moderasi dari sejarah ke konteks kekinian. Oleh karena itu, pesantren dan madrasah memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan radikalisasi serta dalam menjaga stabilitas sosial di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek historis dan sosiologis, moderasi beragama dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia. Praktik ini telah berkembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang menjunjung tinggi toleransi dan keharmonisan antarumat beragama. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular menjadi simbol kuat dari semangat persatuan dalam keberagaman. Dalam konteks kontemporer, moderasi beragama terus diperkuat melalui peran strategis lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah, yang membentuk generasi moderat, toleran, dan inklusif.

Moderasi beragama di Indonesia bukan hanya berakar pada nilai-nilai sejarah, tetapi juga dikembangkan secara aktif sebagai strategi untuk menghadapi tantangan ekstremisme dan menjaga kohesi sosial. Dengan landasan historis yang kuat dan dukungan institusi sosial keagamaan, moderasi beragama menjadi kekuatan fundamental dalam membangun bangsa Indonesia yang inklusif, adil, dan harmonis. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat identitas kebangsaan di tengah keberagaman.

Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya sekadar konsep teoritis, tetapi juga sebuah praktik yang hidup dan terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Fondasi historis yang kuat dan peran vital lembaga pendidikan keagamaan telah membuktikan bahwa nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kedamaian

Copyright © 2025 Helda Agustina, et al.
(cc) BY

sosial tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer. Dengan mempertahankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari tantangan ekstremisme, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai model harmoni dan kerukunan antarumat beragama di dunia modern.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dan moderasi beragama di Indonesia berakar kuat sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut menunjukkan praktik toleransi dan keterbukaan terhadap keberagaman budaya dan agama yang membentuk identitas sosial masyarakat plural. Moderasi beragama, yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada masa Majapahit, terus diperkuat melalui peran lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah. Nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dan moderasi beragama tersebut tetap relevan sebagai fondasi utama dalam menjaga keharmonisan sosial serta mencegah radikalisasi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Saran

1. Penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam pendidikan formal maupun informal di Indonesia. Lembaga pendidikan, terutama pesantren dan madrasah, dapat memainkan peran lebih aktif dalam menanamkan nilai toleransi, kedamaian, dan saling menghormati di kalangan generasi muda.
2. Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat dialog antaragama dan antarbudaya untuk mengurangi potensi konflik sosial dan memperkuat persatuan dalam keberagaman.
3. Perlu ada upaya bersama dalam memanfaatkan warisan sejarah multikulturalisme Indonesia, seperti yang terlihat pada masa Sriwijaya dan Majapahit, sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aizid, U. R. (2016). *Sejarah Islam Nusantara: Dari analisis historis hingga arkeologis tentang penyebaran Islam di Nusantara*. Diva Press.

Alim, M. S., & Munib, A. (2021). Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Madrasah. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, *9*(2), 263. https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5719

Analisna, A., Sulistiani, S., & Yasin, M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *AL AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(01), 1–12.

Arief, M. I. (2024). Dinamika Masyarakat Multikultural: Peta Pemikiran Bhikhu Parekh terhadap Perbedaan Budaya untuk Penguatan Keragaman. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *3*(2), 126–139.

Arifin, Y. (2024). *Sejarah Ringkas Kerajaan Kediri: Sejarah Peradaban Leluhur Nusantara*. Diva Press.

Astuti, N. Y., Hadi, Y. N., & Ardini, M. D. (2025). *Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam*.

Cunino, M. A. (2018). Nasionalisme, Toleransi, dan Kepemimpinan pada Masa Kerajaan-Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia: Analisis Buku Teks Pembelajaran Sejarah SMA. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, *2*(1), 51–60.

Diwyarthi, N. D. M. S., Pratama, I. W. A., Par, S. T., Par, M., Nurkhasyanah, A., Purba, R., Puspawati, S., Saragih, M. C. I., Bantulu, Y., & Munthe, B. (2025). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL*. Cendikia Mulia Mandiri.

Eni, S. P., & Tsabit, A. H. (2017). *Arsitektur Kuno Kerajaan-Kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit di Jawa Timur Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hudin, M. N., Susanti, R., & Hudaidah, H. (2025). Studi Pustaka: Kejayaan Majapahit Masa Pemerintahan Rajasanagara. *Adidaya: Aplikasi Pendidikan Dan Sosial Budaya*, *2*(1), 19–27.

Madri, M., Badarussyamsi, B., Arifullah, A., & Diprata, A. W. (2023). Analisis Atas Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Islam Substantif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, *5*(1).

Mubarok, R. (2022). Management of Material Component Development in Multicultural Islamic Education Curriculum. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, *6*(1), 59–80. https://doi.org/10.21009/hayula.006.02.06

Mubarok, R., & Bakri, M. (2021). Membumikan Multikulturalisme Sebagai Upaya Pencegahan Sikap Radikalisme Beragama. *Ris ,lah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *7*(2), 252–266. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.178

Mubarok, R., & Ghony, M. D. (2024). Empowerment of Local Communities in the Survival of Multicultural Values: Case Study in Tana Toraja Village, East Kutai. *Asian Journal of Education and Social Studies*, *50*(7), 663–677. https://doi.org/10.9734/ajess/2024/v50i71496

Nur, M. (2025). *Kerajaan-Kerajaan Nusantara: Kejayaan dan Keruntuhan*. MiftaChun Nur.

Pramono, M. J. T. N. I. D. B., SIP, M. M., Muchtaridi, U., Pajarianto, H., Sompa, A. T., Manurung, E. B. P., ME, B. E., Eryora, I., Kom, S. E. M., & Khaeruddin, U. (2022). *Implementasi Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Menuju Indonesia Emas 2045*. Indonesia Emas Group.

Ramdhan, T. W., & Arifin, Z. (2025). Pendidikan Agama Multikultural: Membangun Toleransi dan Harmoni dalam Keberagaman. *Press STAI Darul Hikmah Bangkalan*, *1*(1), 1–216.

Rico Setyo Nugroho, M. P. I. (2025). Islam dan HAM: Perspektif Keadilan. *Islam Dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis Dan Praktis*, 43.

Ridley, D. (2012). *The literature review: A step-by-step guide for students*.

Ridwan, S. (2020). Di Balik Ragam Liukan Penggunaan Bentuk Aksara Kuna. *Kreativitas & Kebangsaan*, *229*.

Rohmah, N., Pd, M., & Salabi, A. S. (2025). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakad Media Publishing.

Rohman, M., & Waskito, T. (2025). Pendampingan Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Literasi Digital Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 178–194.

Rozi, M. F. (2017). Pluralisme Danmultikulturalisme Dalam Membangun Masyarakat Madani; Kajian Paradigmatik. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, *2*(2), 104–127.

Copyright © 2025 Helda Agustina, et al.
(cc) BY

Sa'diyah, H. (2025). *Pendidikan Multikultural Dan Moderasi Beragama*. Penerbit KBM Indonesia.

Suddin, S. (2024). Sejarah Indonesia. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, *25*.

Usman, I. (2023). Islam, Toleransi dan Kerukunan Umat Antar Beragama. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, *3*(2), 117–132.

Wahyuni, S. (2018). *Agama Dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, Dan Tradisi Sosial*. Kencana.

Zulfandika, A. A., & Wulandari, S. C. (2024). Analisis Nilai-Nilai Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dalam Pendidikan Moderasi Beragama. *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *5*(1), 67–73.